

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (Studi Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw)

Oleh

TIRTA MAHARDIKA

Kejahatan penyelundupan merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di seluruh dunia, sehingga harus diberantas, dan jika tidak segera diberantas maka akan semakin merajalela. banyak pihak yang menyalahgunakan tindakan tersebut dengan menyelundupkan benih lobster untuk diekspor keluar negeri. Pasalnya, bisnis *seafood* sangat menguntungkan dan dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang cukup sederhana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemidanaan terhadap Terdakwa Harison Bin Hasan berupa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan. Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw atas nama Terdakwa Harison Bin Hasan, diketahui bahwa penyelundupan benih lobster direalisasikan dengan melibatkan banyak orang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw menggunakan pertimbangan yuridis. Sedangkan pertimbangan secara sosiologis perbuatan terdakwa telah merugikan Negara karena telah melakukan kejahatan Penyelundupan Benih Lobster dan tanpa adanya izin usaha. Dan Terdakwa Harison Bin Hasan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu pengawasan lebih ketat terutama untuk biota laut maupun darat yang hendak diselundupkan karena penyelundupan yang dilakukan di wilayah Indonesia merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Dan diperlukan aturan hukum yang tegas terhadap pelaku penyelundupan biota laut atau pun hewan-hewan yang dilindungi, yang memuat tentang larangan serta sanksi pidana terkhusus bagi pelaku penyelundupan hewan air maupun darat. Diharapkan dalam upaya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena perbuatan terdakwa telah merugikan Negara. Dan pelaku penyelundupan sebaiknya diberikan pengetahuan tentang kurangnya atau semakin minimnya sumber daya yang hendak ia selundupkan serta akibat dari tindakan penyelundupan.

Kata Kunci: Analisis, Pidanaan, Penyelundupan, Benih Lobster.

ABSTRACT

CRIMINAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIONS SMUGGLING OF LOBSTER SEEDS (Study of Decision Number: 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw)

By

TIRTA MAHARDIKA

The crime of smuggling is one of the crimes that is still common throughout the world, so it must be eradicated, and if it is not immediately eradicated it will become rampant. many parties abuse this action by smuggling lobster seeds for export abroad. Because the seafood business is very profitable and can be traded illegally in a fairly simple way. The problems in this thesis are: How is the punishment for the perpetrators of the lobster seed smuggling based on the Decision Number 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw and what is the basis for the judge's consideration in making the decision against the perpetrators of the crime of smuggling lobster seeds based on the Decision Number 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw.

The problem approach used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judges at the Liwa District Court, Prosecutors at the West Lampung District Attorney's Office and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: The punishment of the perpetrators of smuggling lobster seeds based on Decision Number 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw is in accordance with applicable regulations. The punishment for the Defendant Harison Bin Hasan is in the form of imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 6 (six) months. The existence of sanctions in the form of crime is determined by the presence or absence of unwanted (prohibited) acts. In Decision Number 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw on behalf of the Defendant Harison Bin Hasan, it is

known that the smuggling of lobster seeds was realized by involving many people. The basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrators of the crime of smuggling lobster seeds based on Decision Number 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw uses juridical considerations. While sociological considerations, the defendant's actions have harmed the State because they have committed the crime of Lobster Seed Smuggling and without a business license. And the Defendant Harison Bin Hasan and has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of "deliberately committing an act in the fishery management area of the Republic of Indonesia, conducting a fishery business in the field of fish transportation and marketing, which does not have a SIUP as referred to in Article 26 Paragraph (1) of the Law. RI Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.

Suggestions in this study are that stricter supervision is needed, especially for marine and land biota who want to be smuggled because smuggling carried out in Indonesian territory is a crime that often occurs. And strict legal regulations are needed against perpetrators of smuggling marine biota or protected animals, which contain prohibitions and criminal sanctions, especially for perpetrators of smuggling water and land animals. It is hoped that law enforcement efforts will focus more on the roles and functions of law enforcement officers to seek material truth and realize justice and public welfare. Because the defendant's actions have harmed the State. And the smuggler should be given knowledge about the lack or lack of resources he wants to smuggle and the consequences of the smuggling act.

Keywords: Analysis, Criminalization, Smuggling, Lobster Seed.